

KENDALA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI DAERAH ALIRAN SUNGAI BATANG KURANJI KOTA PADANG

Aisya Desmaina Wijaya^{1,b}, Zikri Alhadi²

Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

^baisyadesmainawijaya00@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the Obstacles in Flood Disaster Management in the Batang Kuranji River Basin, Padang City. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. This research was conducted at the Padang City Regional Disaster Management Agency (BPBD) office. Research informants were determined by purposive sampling technique. Data collection was carried out by means of observation, interviews and documentation studies. The results of the study showed that BPBD Kota Padang had taken precautions such as socializing and monitoring, but the implementation was still not optimal because there were still problems and obstacles faced by BPBD Padang City. First, internal constraints such as lack of budget, limited human resources who are experts in the field of disaster management owned by BPBD Kota Padang, and inadequate infrastructure. The two external constraints are the lack of coordination between the affected parties and the BPBD, there is still a lack of public awareness in dealing with flood disasters, and the construction of houses around rivers that are not appropriate.

Keywords: *Effectiveness, Disaster Management, Flood, Watershed*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kendala Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Daerah Aliran Sungai Batang Kuranji Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang. Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kota Padang sudah melakukan pencegahan seperti melakukan sosialisasi, melakukan pemantauan namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal karena masih terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh BPBD Kota Padang. Pertama kendala internal seperti kurangnya anggaran yang dimiliki, terbatasnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang penanggulangan bencana yang dimiliki BPBD Kota Padang, dan sarana prasarana yang dimiliki tidak memadai. Kedua kendala eksternal seperti kurangnya koordinasi antara pihak yang terdampak dengan pihak BPBD, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengatasi bencana banjir, serta masih membangun perumahan disekitaran aliran sungai yang tidak sesuai.

Kata Kunci: Efektivitas, Penanggulangan Bencana, Banjir, DAS

Pendahuluan

Salah satu bencana yang sering terjadi di Kota Padang adalah bencana banjir dimana secara geografis Kota Padang terletak di Pesisir Barat pulau Sumatera dengan garis pantai sepanjang 84 km. Luas Kota Padang adalah 694,96 km², dan lebih dari 60% luasnya sekitar



±434,63 km², merupakan kawasan perbukitan yang ditumbuhi hutan lindung, selebihnya merupakan kawasan perkotaan. Sementara topografi kota bervariasi, 49,48% dari luas daratan Kota Padang terletak pada wilayah dengan kemiringan lebih dari 40% dan kemiringan landai 23,57°. Dimana Banjir merupakan sebuah fenomena hidrologi yang ditandai dengan tingginya muka air atau aliran air yang dapat menyebabkan daratan di sekitar danau, sungai, atau tata air lainnya tergenang. Dede Rohmat (dalam Gunawan 2017).

Kota Padang dialiri oleh banyak sungai besar maupun kecil, salah satunya adalah Daerah Aliran Sungai Batang Kuranji. Secara umum sungai-sungai besar dan kecil di Kota Padang tidak berbeda jauh dengan tinggi muka air laut. Keadaan ini membuat banyak wilayah Kota Padang rawan terjadi banjir. Menurut Asdak (2010) Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang dibatasi oleh pegunungan yang mengumpulkan dan menyimpan air hujan, yang kemudian dialirkan ke laut melalui sungai utama.

Pemerintah sebagai pihak yang lebih memiliki wewenang yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, harus melakukan pencegahan serta penanggulangan yang tepat. Pemerintah perlu mengatasi banjir dengan cara yang lebih tepat dan memberikan dampak pada masyarakat. Pemerintah telah membentuk sebuah badan untuk menanggulangi bencana di Indonesia yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yg dibuat sesuai Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008, tentang pembentukan BNPB yang mana berfungsi sebagai *leading sector* dalam penanggulangan bencana yang ada pada Indonesia. Berdasarkan Pasal 10 Ayat 2, organisasi ini ditetapkan sebagai lembaga non pemerintah setingkat kementerian. Dalam Pasal 18 UU No. 24 Tahun 2007 dibentuknya Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota setelah di undangkannya UU No. 24 Tahun 2007 terkait penanggulangan bencana, sehingga penanggulangan bencana perlu ditingkatkan.

Tabel 1
Rekapitulasi Data Kejadian Bencana Banjir Di Kecamatan Nanggalo Kota Padang
Tahun 2020-2022

| No. | Kelurahan | Banyak Kejadian | | |
|--------------|---------------------|-----------------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Tabing Banda Gadang | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Gurun Lawas | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kampung Olo | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kampung Lapai | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Surau Gadang | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kurao Pagang | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 1 | 2 | 3 |

Berdasarkan tabel 1 terkait rekapitulasi data kejadian bencana banjir di Kecamatan Nanggalo tahun 2020-2022 di atas dapat dilihat bahwa ada 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Nanggalo dan 1 Kelurahan yang memang rawan terjadi bencana banjir. Kelurahan Tabing Banda Gadang adalah daerah yang rawan terjadi banjir yang secara geografis terletak di daerah pinggir sungai yang kondisinya adalah di sebuah cekungan sehingga mudah terjadi genangan air. Namun juga berakibat kepada masyarakat yang terkena dampak bencana banjir ini seperti kerusakan sarana prasarana, tenggelamnya kawasan pemukiman, kegagalan panen, dan lainnya.



Sumber: BPBD Kota Padang

Gambar 1. Bencana Banjir di Tabing Banda Gadang Kota Padang.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dengan mewawancarai Bapak Robert Candra Eka Putra, S.Sos, M.Si selaku sekretaris BPBD kota Padang pada tanggal 28 Maret 2023, beliau mengatakan bahwa :

“...Tabing Banda Gadang ini salah satu yang rawan terjadi bencana banjir karena letaknya di pinggir sungai yang berada di sebuah cekungan sehingga mudah terjadi genangan air, penyebab banjir tersebut karena curah hujan yang cukup tinggi dan debit air yang tinggi disebabkan oleh naiknya pasang di laut dan juga akibat terkikisnya tepian sungai yang menyebabkan melebarnya sungai itu dikarenakan belum adanya penahan untuk aliran air atau check dam disana, namun kendala yang di hadapi seperti kurangnya anggaran, sumber daya manusia yang terbatas serta sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD yang kurang memadai”.

Adapun lanjutan dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Robert Candra Eka Putra, S.Sos, M.Si selaku sekretaris BPBD Kota Padang di atas dijelaskan bahwa penyebab banjir di tabing banda gadang tersebut di akibatkan oleh terkikisnya tepian sungai yang menyebabkan melebarnya sungai tersebut dikarenakan belum adanya penahan untuk aliran air atau check dam disana sehingga sering terjadi banjir.



Sumber: Foto Dokumentasi

Gambar 1.3 Sungai Batang Kuranji Kota Padang

Dalam melakukan upaya pencegahan bencana, normalisasi sungai sangat dibutuhkan yang mana merupakan cara untuk memperbaiki dan mengembalikan fungsi sungai secara normal. Tujuan normalisasi sungai adalah untuk merapikan sungai, melindungi tebing dari erosi (kikisan). Atau untuk memperluas profil sungai untuk menampung banjir yang terjadi. Daya dukung sungai berkurang akibat sedimentasi akibat penimbunan pasir dan berkurangnya aliran, baik karena faktor alam maupun ulah manusia sehingga menyebabkan banjir. Salah satu penyebab umum terjadinya banjir adalah karena curah hujan yang tinggi dan aliran air yang berlebihan, dengan banyaknya pembangunan perumahan di sekitaran daerah resap air yang mengakibatkan banjir. Dengan cara melakukan normalisasi sungai adalah salah satu cara untuk mengatasi bencana alam yang mengakibatkan banjir di Kota Padang, khususnya masyarakat di sekitar sungai batang kuranji.

Untuk tindak lanjut dalam penanggulangan bencana di tabing banda gadang ini memang belum ada dan belum maksimal dilakukan di karenakan beberapa kendala seperti kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang mana jumlah tenaga untuk tim reaksi cepat sangat terbatas, kemudian kurangnya anggaran yang dimiliki oleh BPBD yang menyebabkan penanggulangan bencana banjir belum optimal, namun juga masih kurangnya kemampuan BPBD dalam peningkatan masyarakat ketika terjadinya banjir. BPBD yang merupakan *leading sector* dalam penanggulangan bencana di daerah, bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti, PUPR, Basarnas, dan Dinsos. Selain itu, dalam hal ini BPBD juga telah melakukan upaya dengan menjalin hubungan baik dan membina KSB (Kelompok Siaga Bencana) setempat dan juga kader-kader disana. Namun dalam hal ini perlu ditingkatkan kepada masyarakat mengenai pencegahannya agar tidak terjadi banjir. BPBD berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat dengan memberikan sebuah pencerdasan, dan penyadaran dimana mereka harus siap siaga di saat banjir melanda.



Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang. Informan penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dimana dalam pemilihan informan hanya berdasarkan karakteristik tertentu, yaitu orang yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang penulis teliti. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu BPBD Kota Padang, PUPR Kota Padang, Lurah Tabing Banda Gadang, Pakar Bencana, dan masyarakat yang terdampak bencana banjir. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dan teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

Kendala Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Daerah Aliran Sungai Batang Kuranji Kota Padang

1. Kendala Internal

Kendala internal merupakan kendala yang timbul dari dalam organisasi itu sendiri. Dalam upaya penanggulangan banjir di Tabing Banda Gadang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang sebagai koordinator penanggulangan bencana di daerah tersebut menghadapi beberapa kendala, terutama yang berasal dari dalam organisasi sendiri.

Salah satu kendala tersebut adalah terbatasnya sumber daya manusia serta minimnya sarana dan prasarana untuk mengevakuasi dan melakukan pertolongan dalam upaya penanggulangan bencana, baik dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko bencana, mitigasi bencana, maupun pemulihan darurat pasca bencana. Dalam hal ini, diperlukan peralatan yang memadai dan sesuai dengan jenis bencana yang terjadi untuk memfasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana terjadi.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Edrian Edward, S.H, M.H. selaku kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kota Padang pada tanggal 29 Mei 2023. Beliau mengatakan:

“...kendala yang dihadapi oleh BPBD yaitu terbatasnya anggota/personil yang kita miliki untuk turun langsung ke lokasi, serta minimnya peralatan atau sarana prasarana yang dimiliki oleh BPBD sehingga berakibat kesulitan dalam melakukan penanggulangan”.

Lebih jauh Bapak Edrian Edward, S.H, M.H. selaku kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kota Padang pada tanggal 29 Mei 2023. Beliau mengatakan:

“...selain itu kendalanya ya kurangnya koordinasi antara pihak yang terkena bencana, keterlambatan pelaporan yang tidak tepat waktu apabila sudah terjadi bencana baru memberikan informasi. Namun juga kurangnya anggaran. Minimnya anggaran yang dimiliki BPBD mengakibatkan tidak terlaksananya seperti program untuk penanggulangan bencana”.

Kemudian selaras dengan yang dikatakan oleh Ibuk Yuharmilis, S.Pt selaku kepala Lurah Tabing Banda Gadang pada tanggal 5 Juni 2023. Beliau mengatakan:

“...disini sudah beberapa kali dilakukan survei namun tidak ada respon atau perubahan yang dilakukan di tabing banda gadang ini oleh pemerintah yang mana terkendala dari anggarannya maka dari itu belum ada penanggulangan atau perbaikan yang dilakukan di tabing banda gadang ini”.

Dari uraian wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa hal yang menjadi kendala dari pihak BPBD dalam penanggulangan bencana banjir yaitu BPBD kekurangan sarana dan prasarana seperti alat berat, tenda, serta kurangnya anggota/personil dalam penanggulangan bencana tersebut. Dan juga kurangnya anggaran yang dimiliki BPBD yang mengakibatkan terkendala dalam melakukan program penanggulangan bencana banjir sehingga tidak maksimal dalam melakukan penanggulangan bencana banjir di Tabing Banda Gadang.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Al Rahman, ST selaku Tim Teknis SDA dan Drainase DPUPR Kota Padang pada tanggal 13 Juni 2023. Beliau mengatakan:

“... disana karena ada beberapa pembangunan perumahan juga yang menghambat aliran air sehingga mengakibatkan air tidak bisa masuk kesungai maka dari itu untuk penanggulangan belum ada dilakukan secara khusus terkendala juga dari anggaran tidak ada karena pada saat covid anggaran sangat terbatas dan juga bukan tupoksi dari PUPR dan SDA, kemudian sumber daya manusia yang terbatas dan peralatan mekanis yang kami miliki juga kurang memadai”.

Berdasarkan wawancara di atas selaras dengan yang di sampaikan oleh Bapak Zuhirman, ST selaku pengelola sumber daya air pada tanggal 13 Juni 2023. Beliau mengatakan:

“..., memang di tabing banda gadang ini sangat rawan sekali terjadi bencana banjir namun, yang menjadi kendala kami yaitu dari anggaran yang tidak ada, maka dari itu belum ada pembangunan atau perbaikan yang kami lakukan untuk sekarang ini.”

Berdasarkan wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa BPBD maupun Dinas PUPR dalam melakukan penanggulangan di tabing banda gadang terkendala dengan anggaran karena anggaran tersebut sangat penting dalam menunjang kegiatan untuk melakukan penanggulangan bencana, maka dari itu sampai sekarang belum ada dilaksanakan rehabilitasi maupun rekonstruksi di tabing banda gadang ini karena sangat penting untuk di perhatikan dimana daerah tabing banda gadang ini rawan terjadi bencana banjir.

2. Kendala eksternal

Kendala eksternal merujuk pada hambatan yang berasal dari faktor luar organisasi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Edrian Edward, S.H, M.H. selaku kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kota Padang. Pada tanggal 29 Mei 2023 Beliau mengatakan:

“...kendala dari luar seperti pemahaman dan tingkat kesadaran dari masyarakat itu masih kurang dan koordinasi antara pihak yang terdampak masih kurang.”

Kemudian selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Al Rahman, ST selaku Tim Teknis SDA dan Drainase DPUPR Kota Padang pada tanggal 13 Juni 2023. Beliau mengatakan:

“...kalau masalah dari luar ya seperti masyarakat yang kurang memahami peraturan untuk tidak membangun perumahan di sekitaran aliran sungai tersebut”.

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kendala eksternal atau kendala dari luar yang di hadapi oleh BPBD dan PUPR Kota Padang dalam penanggulangan bencana di tabing banda gadang ini yaitu bahwa kesadaran dari masyarakat masih kurang dan juga kurangnya koordinasi antara pihak yang terdampak banjir dengan pihak BPBD Kota Padang, serta masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan dampak bencana banjir dalam membantu pencegahan serta masih membangun perumahan di sekitaran aliran sungai tersebut.



Kesimpulan

Kendala yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dalam penanggulangan bencana banjir di tabing banda gadang yang pertama adalah hambatan internal yang timbul dari dalam organisasi itu sendiri yaitu kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang ahli dalam bidang penanggulangan bencana, dan kekurangan anggaran untuk melakukan penanggulangan bencana banjir yang mana anggaran sangat penting dalam menunjang pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di tabing banda gadang tersebut. Yang kedua kendala eksternal merupakan kendala yang berasal dari luar organisasi tersebut yaitu kurangnya koordinasi antara pihak yang terdampak dengan pihak BPBD Kota Padang, serta masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup dimana masih membangun perumahan di sekitar aliran sungai yang berakibat terhambatnya aliran sungai tersebut.

Daftar Pustaka

- Baseri, H., Jarmie, M. Y., & Anhar, D. (2017). Efektivitas komunikasi badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Banjar dalam mengurangi resiko bencana banjir di Kabupaten Banjar. *Al-KALAM: JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN*, 4(1), 1-19.
- Eldi, E. (2020). Analisis Penyebab Banjir di DKI Jakarta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(6), 1057-1064.
- Hanwar, S., & Munandar, A. (2017). Pengendalian Banjir Batang Kuranji Menggunakan Program HEC-RAS. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil*, 14(1), 30-41.
- Ismayani, N. (2020). Studi Tingkat Bahaya Banjir Das Batang Kuranji Kecamatan Pauh Kota Padang. *Jurnal Azimut*, 3(01), 15-20.
- Lindawati, L., & Kurniasari, N. (2014). Persepsi Pelaku Usaha Tambak Terhadap Penanggulangan Bencana Banjir di Pantai Utara Jawa Barat. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 9 (2), 59-64.
- Putra, R. (2021). Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kerinci Dalam Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 3(7), 125-133.
- Utama, L. (2022). Kawasan Berpotensi Banjir Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kuranji. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 4 Tahun 2008.